

**LAPORAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
PERIODE JANUARI S/D MARET 2024**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Meja Informasi Di Pengadilan

1. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu badan publik yang harkat dan dengan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab pada pelayanan meja informasi dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID.
3. Meja informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik
4. Pelayanan adalah suatu cara untuk menyajikan dan melayani suatu proses menurut prosedur dan aturannya yang telah ditentukan
5. Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan /atau badan hukum yang mengajukan permohonan informasi ke Pengadilan.

B. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No.	Permohonan Informasi Non Perkara	Jumlah	No.	Permohonan Informasi Perkara	Jumlah
1	Informasi Data Pegawai	0	4	Informasi Jumlah Perkara	0
2	Informasi Data Keuangan	0	5	Informasi data perkara / putusan	8
3	Informasi non perkara lainnya	0	6	Informasi perkara lainnya	0

C. Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

No.	Informasi Non Perkara yang di kabulkan sebagian	Jumlah	No.	Informasi Non Perkara yang di kabulkan seluruhnya	Jumlah
1	Informasi Data Pegawai	0	4	Informasi Data Pegawai	0
2	Informasi Data Keuangan	0	5	Informasi Data Keuangan	0
3	Informasi non perkara lainnya	0	6	Informasi non perkara lainnya	0

No.	Informasi Perkara yang di kabulkan sebagian	Jumlah	No.	Informasi Perkara yang di kabulkan seluruhnya	Jumlah
1	Informasi Jumlah Perkara	0	4	Informasi Jumlah Perkara	0
2	Informasi data perkara / putusan	0	5	Informasi data perkara / putusan	8
3	Informasi perkara lainnya	0	6	Informasi perkara lainnya	0

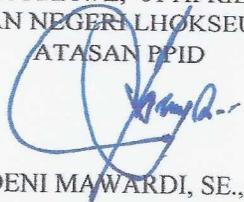
D. Jumlah Informasi yang di tolak dan Alasannya

No.	Permohonan Informasi Non Perkara	Jumlah	No.	Permohonan Informasi Perkara	Jumlah
1	Informasi Data Pegawai	0	4	Informasi Jumlah Perkara	0

2	Informasi Data Keuangan	0	5	Informasi data perkara / putusan	0
3	Informasi non perkara lainnya	0	6	Informasi perkara lainnya	0

MENGETAHUI
PENGADILAN NEGERI LHO
KSEUMAWE
KETUA

FAISAL MAHDI, SH.MH

LHOKSEUMAWE, 01 APRIL 2024
PENGADILAN NEGERI LHO
KSEUMAWE
ATASAN PPID

DENI MAWARDI, SE.,Ak.

LAMPIRAN
PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI S/D APRIL 2024

No.	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Jenis Informasi yang di minta
1	Torang Pangondian Siregar	12 Januari 2024	Implementasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Kenakalan Remaja Di Kota Lhokseumawe
2	Rejika Hendra	18 Januari 2024	Tindak Pidana Yang Dilakukan Pengungsi International Di Kota Lhokseumawe
3	Salsabila Putri Rasri	25 Januari 2024	Gugatan Class Action Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Lhokseumawe
4	Rejika Hendra	31 Januari 2024	Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya Di Kota Lhokseumawe
5	Dahlia Sasmita	23 Februari 2024	Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
6	Gusfanul Marraf	29 Februari 2024	Kedudukan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana
7	Maysarah	4 Maret 2024	Strategi Komunikasi Dalam Penanganan Sengketa Batas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe
8	Mas Juan Pratama	21 Maret 2024	Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata